



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 9 Desember 2016 No. 98

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ir.AZAHARI
2. Jabatan : KEPALA SUB DIREKTORAT - PENGELOLAAN SARANA MILIK NEGARA - DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
3. Alamat Kantor : Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8, JAKARTA PUSAT
4. Tanggal Pelaporan : 12 Agustus 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK

..... Rp. **3.072.900.000**

(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah & Bangunan seluas 370 m2 & 220 m2, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari ---, perolehan tahun 1993 NJOP Rp.1.535.950.000
2. Tanah & Bangunan seluas 370 m2 & 200 m2, di Kota JAKARTA BARAT, yang berasal dari ---, perolehan tahun 1999 NJOP Rp.1.536.950.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI

..... Rp. **104.000.000**

DAN MESIN LAINNYA

1. Mobil, merk TOYOTA, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010 nilai jual Rp.95.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 nilai jual Rp.9.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	0
C. SURAT BERTAGIH Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	14.775.151
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.14.775.151		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	3.191.675.151
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	3.191.675.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

